BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Instansi

2.1.1 Riwayat Perusahaan

Dalam suatu Organisasi Pegawai merupakan unsur penting sebagai motor penggerak yang akan menjalankan roda organisasi mencapai tujuan, sejalan dengan itu maka lembaga yang mengelola/menangani kepegawaian harus mendapat perhatian agar dapat diwujudkan dan dibentuk pegawai yang berkualitas, berdedikasi yang tinggi serta memiliki moralitas.

Untuk mewujudkan Kepegawaian yang handal, Pemerintah telah beberapa kali mengadakan penyesuaian atau perubahan terhadap aturan Kepegawaian mulai dari UU Nomor 8 Tahun 1974 yang diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian serta perubahan terhadap beberapa peraturan pemerintah sebagai tindak lanjut dari undang-undang Kepegawaian tersebut. Oleh karena lembaga memegang peranan yang pentingmaka seiring dengan perkembangan jaman, serta tuntutan masyarakat yang membawa konsekuensi pada meningkatnya beban tugas, maka Pemerintah juga mengadakan peraturan tentang peraturan Kelebagaan yang menangani bidang Kepegawaian.

Pada awalnya lembaga yang membidangi Kepegawaian di Kabupaten Tabanan disebut Bagian Kepegawaian, penetapan Bagian Kepegawaian mengacu pada Perda Kabupaten Tabanan Nomor 7 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tk. II Tabanan dan Sekretariat DPRD

Daerah Tingkat II Tabanan. Selanjutnya dengan berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dimana daerah diberi kekuasaan dalam pembentukan Kelembagaan sesuai dengan potensi dan kebutuhan Daerah, maka Pemerintah memberikan PP Nomor 84 Tahun 2000 tentang pola Penyusunan Perangakat Daerah, sebagai tindak lanjut di Daerah terjadi penggabungan beberapa fungsi, antara lain fungsi Kepegawaian digabung dengan fungsi Organisasi, sehingga berdasarkan Perda Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2001 bagian Kepegawaian diubah menjadi Bagian Kepegawaian dan Organisasi, bagian ini berada dibawah secretariat Daerah. Pada tahun 2002, dengan tetap berpedoman pada PP 84 Tahun 2000, diadakan perubahan terhadap lembaga yang menangani Kepegawaian Daerah, hal ini dimaksudkan untuk pencapaian pelayanan karena meningkatkanya beban kerja, perubahan ini ditetapkan dengan Perda Kabupaten Tabanan Nomor 19 Tahun 2002 tentang penyempurnaan Perda Nomor 2 Tahun 2001, namun Perda ini baru berlaku efektif pada April 2003, saat mana jabatan pada Badan Kepegawaian Daerah telah diisi dan penjabatnya telah dilantik sesuai kebutuhan yang berlaku, selanjutnya dalam Perda ditetapkan, Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah merupakan lembaga teknis Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam biang Kepegawaian.

Sebagai lembaga teknis Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati di bidang Kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah dituntut untuk menyiapkan aparatur yang bersih, berwibawa, bermoral, professional serta bebas Nepotisme, Korupsi dan Kolusi (NKK). Hal ini dimaksudkan agar Badan

Kepegawaian Daerah dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan serta mampu membuat respon yang cepat terhadap tuntutan kerja dan beban kerja yang semakin meningkat.

2.1.2 Bentuk dan Badan Hukum Badan Kepegawaian Daerah

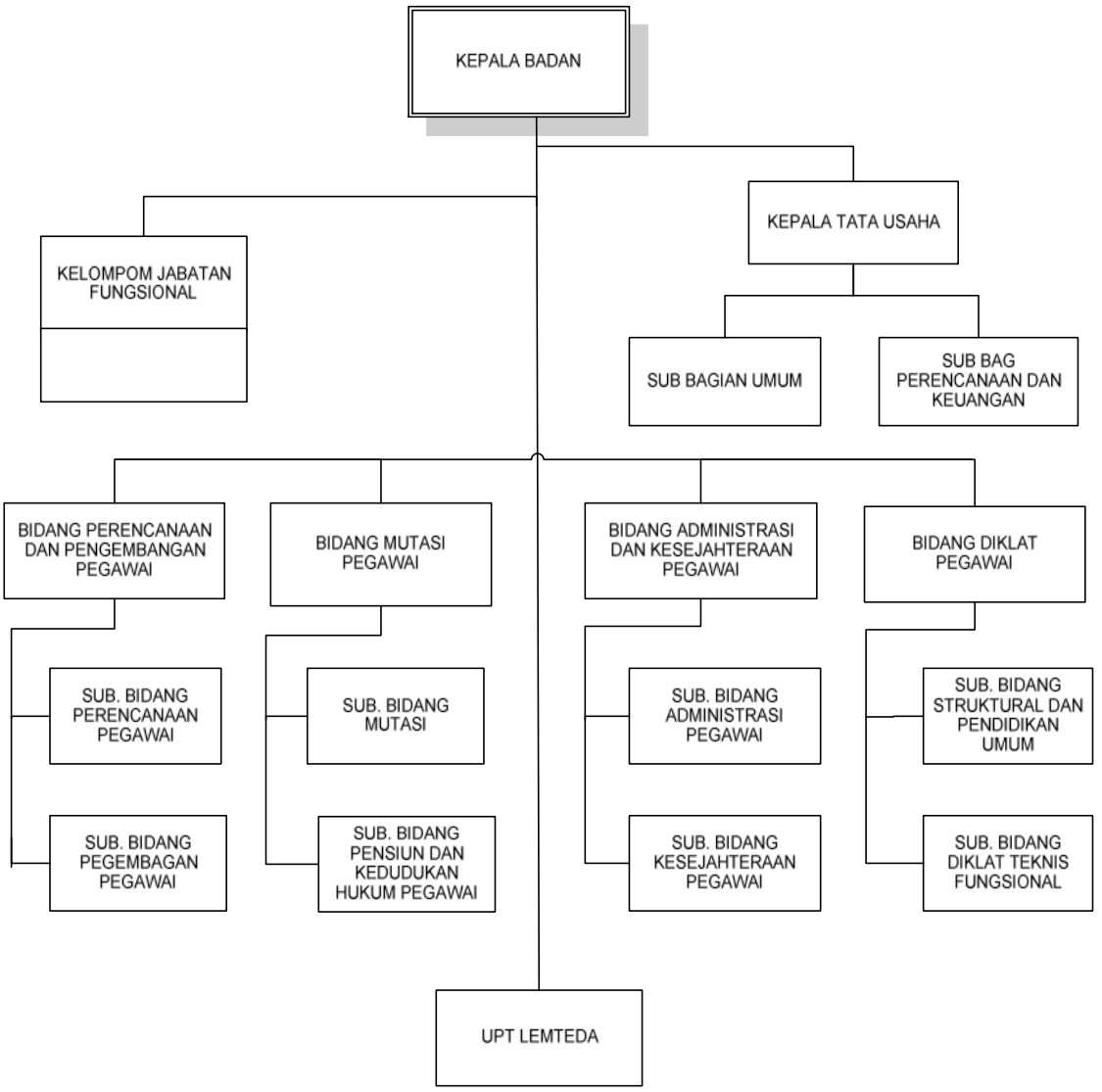
Badan Kepegawaian Daerah merupakan lembaga teknis Daerah dibidang Kepegawaian. Berada dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

2.1.3 Struktur Organsisasi Perusahaan

Organisasi dalam arti bagan adalah kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Dari pengertian tersebut diatas dapat dicari suatu kesimpulan tentang pengertian organisasi secara universal mengandung pengertian sebagai kumpulan orang-orang yang bekerja sama dengan dasar persamaan tujuan.

Organisasi perusahaan sangat penting dalam menjamin kelangsungan dan kelancaran mekanisme kerja perusahaan, adanya organisasi dimaksudkan untuk menciptakan suatu sistem pembagian kerja atau tugas yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan sehingga mempermudah kegiatan operasional perusahaan dalam mencapai tujuan

Struktur organisasi pada Badan Kepegawain Daerah Kabupaten Tabanan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan ditindak lanjuti dengan Perda Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2006 adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi

2.1.4 Bidang Pekerjaan Badan Kepegawaian Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2006, uraian tugas jabatan ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

Kepala BKD mempunyai tugas :

1. Menyusun program kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tabanan berdasarkan rpjpd, rpjmd, rkpd dan rencana strategis Kabupaten;
2. Merumuskan kebijaksanaan teknis bidang kepegawaian berdasarkan kewenangan yang ada dan kondisi obyektif di lapangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
3. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
4. Membina bawahan dalam pencapaian program dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanankan tugas yang sudah berjalan sesuai dengan kentetuan yang berlaku;
5. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikutnya;
6. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai, ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan karier;
7. Merumuskan kebijaksanaan bupati dalam pengadaan, pengangkatan dan pemindahan serta pemberhentian dalam jabatan dan pangkat, pembinaan, kesejahteraan, pendidikan dan latihan serta pemberhentian pegawai berdasarkan ketentuan yang berlaku;
8. Melaksanakan pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatn dan pangkat serta peberhentian pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

9. Menyelenggarakan kesejahteran dan pemberian penghargaan kepada pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;
10. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan dalam jabatan bagi pegawai untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pegawai sesuai kebutuhan yang berlaku;
11. Mengkaji dan menganalisa permasalahan kepegawaian untuk mendapatkan pemecahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Menginventarisasi permasalahan perencanaan dan keuangan serta memberikan alternatif pemecahannya;
13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
14. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada bupati melalui sekretaris daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Kepala Bagian Tata usaha mempunya tugas :

1. Menyusun program kerja Bagian Tata Usaha berdasarkan rpjpd, rpjmd, rkpd dan rencana strategis Kabupaten;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
3. Mengkoordinasi para kepala sub bagian agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
4. Membimbing/memberi petunjuk kepada para kepala sub bagian dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;

5. Menilai hasil pelaksanaan urusan umum, kepegawaian dan keuangan BKD berdasarkan ketentuan yang berlaku;
6. Melaksanakan pengelolaan urusan umum, kepegawaian dan keuangan BKD berdasarkan ketentuan yang berlaku;
7. Mengatur pelaksanaan urusan rumah tangga, tata usaha, kepegawaian, keuangan dan perjalanan dinas pada BKD sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Mengkoordinasi dan memberikan pelayanan administrasi bidang-bidang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
9. Menyusun laporan kegiatan BKD berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
10. Menganalisa permasalahan pada sekretariat BKD untuk dapat memberikan pemecahan yang benar;
11. Menginventarisasi permasalahan bagian tata usaha serta memberikan alternatif pemecahannya;
12. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
13. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala badan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Sub Bagian Umum

1. Menyusun rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian sesuai dengan dokumen rencana yang ada;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;

3. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
4. Menilai hasil prestasi kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pedoman pengembangan karier;
5. Melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian BKD berdasarkan ketentuan yang berlaku;
6. Menyelenggarakan administrasi kearsipan pola baru BKD berdasarkan ketentuan yang berlaku;
7. Mempersiapkan laporan kegiatan BKD berdasarkan ketentuan yang berlaku;
8. Mengevaluasi kegiatan sub bagian umum berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk penyempurnaan kegiatan sebelumnya;
9. Menginventarisasi permasalahan sub bagian umum serta memberikan alternatif pemecahannya;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan;
11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunya tugas :

1. Menyusun rencana kerja sub bagian perencanaan dan keuangan sesuai dengan rencana yang ada;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;

3. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
4. Menilai hasil prestasi kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pedoman pengembangan karier;
5. Menyusun rencana anggaran BKD berdasarkan ketentuan yang berlaku;
6. Melaksanakan pengamperahan, pendistribusikan dan penyimpanan anggaran BKD berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas berjalan lancar;
7. Mengevaluasi penyelenggaraan keuangan BKD berdasarkan ketentuan yang berlakuagar penggunannya sesuai dengan program yang ditetapkan;
8. Menginventarisasi permasalahan sub bagian umum serta memberikan alternatif pemecahannya;
9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan;
10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai mempunya tugas :

1. Menyusun program kerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai berdasarkan rpjpd, rpjmd, rkpd dan rencana strategis Kabupaten;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
3. Mengkoordinasi para kepala sub bidang agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;

4. Membimbing/memberi petunjuk kepada para kepala sub bidang dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
5. Menilai hasil pelaksanaan kegiatan para kepala sub bidang dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
6. Menyusun formasi pegawai, merencanakan pengadaan dan penyebaran pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menyelenggarakan pembinaan pegawai berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan disiplin dan kinerja pegawai;
8. Melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Menginventarisasi permasalahan di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai serta memberikan alternatif pemecahannya;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala badan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Sub Bidang Perencanaan Pegawai mempunya tugas :

1. Menyusun rencana kerja sub bidang perencanaan dan keuangan sesuai dengan rencana yang ada;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
3. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

4. Menilai hasil prestasi kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pedoman pengembangan karier;
5. Mengumpulkan, mengelola data dan formasi pegawai berdasarkan ketentuan yang berlaku;
6. Melakukan penyusun rencana kebutuhan pegawai, penyelenggaraan simpeg berdasarkan ketentuan yang berlaku;
7. Melakukan pengadaan cpns, penempatan cpns, dan pengujian kesehatan cpns;
8. Melaksanakan pemberian informasi kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku;
9. Menginventarisasi permasalahan sub bidang perencanaan pegawai serta memberikan alternatif pemecahannya;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan;
11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Sub Bidang Pengembangan Pegawai mempunya tugas :

1. Menyusun rencana kerja sub bidang pengembangan pegawai sesuai dengan rencana yang ada;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
3. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

4. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pedoman pengembangan karier;
5. Mengumpulkan data jabatan unit-unit verja di lingkungan pemerintah Kabupaten Tabanan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
6. Menyusun naskah keputusan bupati tentang mutasi jabatan pns berdasarkan ketentuan yang berlaku;
7. Melakukanpembinaan pegawai untuk peningkatan disiplin dan kinerja pegawai;
8. Melakukan penyusunan rencana penyelenggaraan ujian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Menginventarisasi permasalahan sub bidang pengembangan pegawai serta memberikan alternatif pemecahannya;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan;
11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Bidang Mutasi mempunya tugas :

1. Menyusun program kerja bidang mutasi berdasarkan rpjpd, rpjmd, rkpd dan rencana strategis Kabupaten;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
3. Mengkoordinasi para kepala sub bidang agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;

4. Membimbing/memberi petunjuk kepada para kepala sub bidang dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
5. Menilai hasil pelaksanaan kegiatan para kepala sub bidang dan bawahan serta menilai prestasi kerjanya sebagai bahan pengembangan karier;
6. Menyusun dan melaksanakan kebijaksanaan kepala BKD dalam bidang mutasi kepangkatan dan gaji, pensiun pns serta kedudukan hukum pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Membuat kajian, telahaan berkaitan dengan penyelenggaraan disiplin yang dilakukan oleh pegawai serta mempersiapkan tindakan hukum yang diberikan;
8. Memproses usul kenaikan pangkat pegawai negeri sipil daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku;
9. Memproses usul pensiun dan kenaikan pangkat pengabdian pegawai negeri sipil daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku
10. Menganalisa permohonan berhenti atau pemberhentian pegawai, perpindahan pns antar daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku;
11. Menginventarisasi permasalahan bidang mutasi pegawai serta alternatif pemecahannya;
12. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
13. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala badan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Sub Bidang Mutasi mempunya tugas :

1. Menyusun rencana kerja sub bidang mutasi pegawai sesuai dengan rencana yang ada;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
3. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
4. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pedoman pengembangan karier;
5. Menyusun daftar nominatif kenaikan pangkat, daftar peserta ujian kenaikan pangkat penyesuain ijasah, serta persetujuan peningkatan pendidikan pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Mempersiapkan dan meniliti van usul pengangkatan cpnsd kabupaten Tabanan, kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala berdasarkan ketentuan yang berlaku;
7. Menyusun persetujuan pertimbangan teknis kenaikan pangkat pejabat struktural dan fungsional umum berdasarkan ketentuan yang berlaku;
8. Membuat naskah keputusan bupati tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan teknis kepala badan kepegawaian negara dan ketentuan yang berlaku;
9. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan disiplin dan kinerja pegawai;

10. Memproses perpindahan pns antar daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. Menginventarisasi permasalahan sub bidang mutasi pegawai serta memberikan alternatif pemecahannya;
12. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan;
13. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Sub Bidang Pensiun dan Kedudukan Hukum Pegawai mempunya tugas :

1. Menyusun rencana kerja sub bidang Pensiun dan Kedudukan Hukum Pegawai sesuai dengan rencana yang ada;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
3. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
4. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pedoman pengembangan karier;
5. Menyusun daftar nominatif pegawai yang akan pensiun sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Mempersiapkan van usulan, pensionan pegawai deserta janda/duda pegawai berdasarkan ketentuan yang berlaku;
7. Mengolah van dan menyusun naskah keputusan bupati tentang pemberhentian pegawai negeri sipil daerah sesuai ketentuan yang berlaku;

8. Mengumpulkan, megolah data pelanggaran disiplin pegawai serta pns sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan disiplin dan kinerja pegawai;
10. Memproses perpindahan pns antar daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. Menginventarisasi permasalahan sub Pensiun dan Kedudukan Hukum Pegawai serta memberikan alternatif pemecahannya;
12. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan;
13. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai mempunya tugas :

1. Menyusun program kerja Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai berdasarkan rpjpd, rpjmd, rkpd dan rencana strategis Kabupaten;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
3. Mengkoordinasi para kepala sub bidang agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
4. Membimbing/memberi petunjuk kepada para kepala sub bidang dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
5. Menilai hasil pelaksanaan kegiatan para kepala sub bidang dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;

6. Melaksanakan tata usaha pegawai meliputi menyiapkan usulan pengadaan kartu pegawai, kartu karsu, taspen, serta pengalihan hak-hak pegawai lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Melaksanakan pengadaan penyusunan daftar unit kepangkatan (duk);, cuti, ijin perkawinan/perceraian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Melaksanakan pelayanan informasi kepegawaian serta pengembangan data pegawai dan kearsipan pegawai pada pemkab Tabanan;
9. Menyusun rencana, mengurus peningkatan kesejahteraan pegawai pemberian penghargaan slks dan penghargaan kepada pegawai termasuk yang pensiun, janda dan duda;
10. Melaksanakan pengujian kesehatan pegawai berdasarkan laporan dari unit kerja terkait dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. Mengolah bahan dan menyusun naskah keputusan bupati tentang pemberian penghargaan pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. Menginventarisasi permasalahan di bidang Administrasi dan Kesejahteraan pegawai serta memberikan alternatif pemecahannya;
13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
14. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala badan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Sub Bidang Administrasi Pegawai mempunya tugas :

1. Menyusun rencana kerja sub bidang Administrasi Pegawai sesuai dengan rencana yang ada;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
3. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
4. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pedoman pengembangan karier;
5. Melaksanakan tata usa pegaai meliputi menyiapkan usulan pengadaan kartu pegawai, kartu karsu, taspen, serta pengurusan hak-hak pegawai lainya sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Melaksanakan pegadaan penyusunan daftar urut kepagkatan (duk), cuti, ijin perkawinan/perceraian sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Melaksanakan pelayanan informasi kepegawaian serta pengembangan data pegawai dan data kearsipan pegawai pada Pemkab Tabanan;
8. Mengumpulkan, mengolah laboran pegawai Saint perla mempersiapkan pengujian kesehatan pegawai sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan;
10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai mempunya tugas :

1. Menyusun rencana kerja sub bidang Kesejahteraan Pegawai sesuai dengan rencana yang ada;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
3. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
4. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pedoman pengembangan karier;
5. Menyusun rencana peningkatan kesejahteraan pegawai serta mengurus pemberian penghargaan slks dan penghargaan kepada pegawai termasuk yang pensión janda dan duda;
6. Melaksanakan pemberian kesejateraan pegawai meliputi pengadaan pakaian dinas pegawai dan kesejahteraan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Mengolah van dan menyusun nazca keputusan bupati tentang pemberian penghargaan pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Menginventarisasi permasalahan sub bidang kesejahteraan pegawai serta alternatif pemecahannya;
9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan;
10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Bidang Diklat Pegawai mempunya tugas :

1. Menyusun program kerja Bidang Diklat Pegawai Pegawai berdasarkan rpjpd, rpjmd, rkpd dan rencana strategis Kabupaten;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
3. Mengkoordinasi para kepala sub bidang agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
4. Membimbing/memberi petunjuk kepada para kepala sub bidang dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
5. Menilai hasil pelaksanaan kegiatan para kepala sub bidang dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
6. Melaksanakan kebijaksanaan kepala BKD dalam bidang diklat pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Mengkoordinasikan dan mengadakan erja sama dengan instansi terkait agar penyelenggaraan diklat pegawai berjalan lancar;
8. Merumuskan kebutuhan diklat pegawai berdasarkan ketentuan yang berlaku;
9. Melaksanakan diklat pegawai atau pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat pegawai dan pegawai tugas besar berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pegawai;
10. Menginventarisasi permasalahan di bidang diklat pegawai serta memberikan alternatif pemecahannya;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

12. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala badan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

2.1.5 Visi dan Misi Perusahaan

Era reformasi telah mengantarkan bangsa ini pada perubahan perubahan di segala bidang baik ekonomi,social politik maupun budaya dan pemerintahan, khususnya dalam penyelenggaraan, Pemerintahan di warnai dengan derasnya gelombang tuntutan masyarakat untuk mewujudkan pemerintah yang bebas KKN, kondisi ini diesebabkan oleh akumulasi dan kristalisasi dari proses penyelenggaraan Pemerintahan di masa lalu, yang di rasakan kurang memuaskan serta kurang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat. Pergeseran paradigm Pemerintah, dan proses pemerintahan bersifat sentralisasi dan terlalu mengatur menjadi pemerintahan desentralisasi dengan pembentukana daerah otonomi merupakan salah satu respon pemerintah untuk mennjawab tuntutan masyarakat, ileh karenanya dalam jangka panjang semua instansi pemerintah harus mengadakan penyesuaian terhadap Visinya, Visi adalah merupakan suatu harapan atas cita cita yang ingin di capai dimasa yang akan datang.

Pemerintah Kabupaten Tabanan telah menetapkan VISI yaitu "Terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui Pembangunan Berkelanjutan berwawaskan Budaya dan Lingkungan"

BKD selaku lembaga teknis Daerah dibidang Kepegawaian yang akan memberi dukungan sumber daya aparatur (SDM) untuk mencapai Visi Kabupaten

Tabanan telah menetapkan Visi sebagai berikut “Terwujudnya Aparatur yang professional melalui pembinaan, penataan administrasi dan Kesejahteraan Aparatur”

Visi tersebut mengandung Tiga Filosofi pokok yang akan di sesuaikan perwujudannya yaitu :

1. Aparatur yang professional
2. Pembinaan Aparatur
3. Penataan Administrasi dan Kesejahteraan

Aparatur yang professional adalah aparatur yang mempunyai kapabilitas, integritas, moralitas dan etika yang tinggi, dengan kapabilitas, integritas, moral dan diduking oleh kualitas yang dimilikinya, aparatur daerah akan relating mudah memahami realitas yang dihadapinya, memahami akar dari setiap masalah yang memantapkan bidang tugasnya serta mampu merumuskan preskripsi-preskripsi yang tepat. Pembinaam aparatur di maknai sebagai suatu kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pengembangan, penempatan dari pada aparatur.

Penataan administrasi merupakan faktor terpenting didalam memelihara sumber daya manusia yang tersedianya data dan informasi mengenai kepegaewan yang akurat dan cepat dan handal dalam rangka meningkatkan garis kerja untuk peningkatan pelayanan dan pencapaian hasil yang lebih prestatif diikuti peningkatan sendi-sendi kesejateraan aparatur. Dapat dipahaami bahwa Visi umumnya masih bersifat abstrak dan angan andan dan untuk mewujudkan Visi

maka perlu menetapkan misi yaitu tugas yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi Badan Kepegawean Daerah Kabupaten Tabanan adalah :

1. Meningkatkan kwalitas sumber daya manusia aparatur

2. Mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja aparatur

3. Menciptakan penataan administrasi dan kesejahteraan aparatur

Tujuan dari visi dan misi yang telah ditetapkan merupakan rumusan operasional, dimana Stake Holders harus memperhatikan Visi, Misi dan Faktor-Faktor penentu keberhasilan serta memperhitungkan kekuatan, kelemahan dan sumber daya yang dimiliki

Adapun tujuan Badan Kepegawean Daerah Kabupaten Tabanan sesuai dengan misi yang di tetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kwalitas sumber daya manusia aparaturr memiliki tujuan :

   a. meningkatkan kemampuan kerja aparatur
   b. meningkatkan tanggung jawab dan etika kerja aparatur

2. mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja aparatur

   a. meningkatkan kemampuan aparatur
   b. meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab aparatur

3. Menciptakan Penataan Administrasi dan Kesejahteraan aparatur

a. meningkatkan pelaksaan manajemen kepegawaian
b. meningkatkan pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian
c. meningkatkan kesejahteraan aparatur

Sasaran merupakan penajabaran setiap tujuan yang telah ditetapkan yang mana sasaran BKD Kabupaten Tabanan akan diupayakan terwujudnya untuk satu tahun kedepan. Adapun sasaran yang akan diwujudkan BKD Kabupaten Tabanan berdasarkan setiap tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan j*UML*ah pegawai yang mendapa diklat
2. Meningkatkan disiplin pegawai
3. Adanya pengakuan terhadap pengabdian pegawai dan perhatian terhadap kesehatan pegawai.
4. Meningkatkan tertib administrasi kepegawaian.
5. Meningkatkan kinerja aparatur dalam memproses sesuai bidan kepegawaian.
6. Tersedianya sarana dan prasarana

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Manajemen E-Goverment

e-government memiliki pengertian budaya pemanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal di semua bidang penyelenggaraan pemerintahan baik di wilayah kekuasaan legislatif, yudikatif maupun terutama

eksekutif. Dalam praktek, mekipun pengertian *e-government* lebih dari sekedar pemasangan website, keberadaan webiste dapat dipandang sebagai gerbang menuju penggunaan semua fasilitas *e-government* baik oleh masyarakat di wilayah politik yang bersangkutan, aparat pemerintahnya maupun oleh masyarakat umum yang lebih luas (investor, turis, dan sebagainya).

Tidak berbeda dengan sistem-sistem informasi pada umumnya, elemen-elemen eGoverment dapat diklasifikasikan dalam bagian-bagian yang melayani 3 kelompok pengguna/operator: masyarakat, operator dan pengambil keputusan. Bagian pelayanan masyarakat memberikan kemudahan proses untuk:

1. mendapatkan informasi potensi wilayah, kependudukan dan pengembangan/pemanfaatan potensi-potensi tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

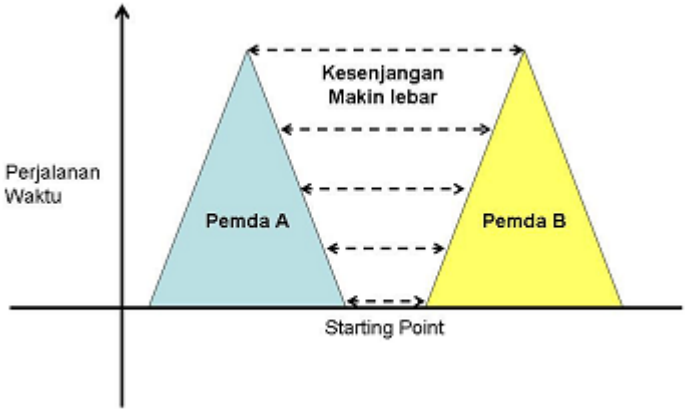
2. mendapatkan kartu identitas diri (kependudukan), 3. pengurusan berbagai perijinan, serta 4. penghitungan dan pembayaran pajak dan retribusi. Kegiatan operator utama adalah memasukkan data ke dalam sistem dan menerbitkan segala macam laporan yang diperlukan termasuk berbagai surat yang diperlukan tiap penduduk seperti KTP, kartu keluarga, dan kutipan akse kelahiran. Kualitas sistem bergantung pada kualitas kerja pemasukan data karena sistem akan dapat bekerja dengan baik apabila di dalamnya terkandung data primer yang lengkap dan akurat.

Bagi pengambil keputusan, sistem harus bisa menyajikan data dalam berbagai bentuk yang diperlukan untuk memudahkan dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Sebagai contoh, perlu tidaknya pangadaan sekolah baru

hanya dapat diputuskan dengan benar apabila tersajikan dengan akurat jumlah penduduk usia sekolah dan jumlah serta jenjang sekolah yang ada. Karena fungsi utamanya adalah memberikan kemudahan dan kesederhanaan prosedur, maka penerapan konsep *e-government* memerlukan perubahan struktur organisasi pemerintahan itu sendiri.

Dari berbagai aspek pengembangan Teknologi Informasi di Indonesia, *e-government* merupakan salah satu sektor yang masih sangat lemah dan lambat perkembangannya. Perkembangan politik nasional disadari atau tidak turut memberikan andil terhadap lemahnya perkembangan Teknologi Informasi dalam pemerintahan dan Sistem Informasi *E-government*. Belum adanya kesamaan persepsi dan komitmen nasional menyebabkan *e-government* menjadi abuabu pada masa transisi sentralistik ke desentralisasi/otonomi daerah. Fenomenanya justru berubah bukannya kebijakan nasional yang menjadi acuan, namun pada kenyataannya justru kebijakan nasional itu loyo bahkan tidak mengatur sama sekali. Akibatnya daerah menentukan sendiri-sendiri kebijakan pengembangan *e-government* sesuai dengan kebutuhan, kemampuan atau pengaruh eksternal lainnya. Pada sisi positif, semangat yang dikembangkan para pengelola *e-government* di daerah membuktikan bahwa daerah lebih mampu mengelola dan mengendalikan Teknologi Informasi dan egovernment dibanding pusat. Namun pada sisi negatif, keberhasilan dan prestasi yang dihasilkan oleh para pengelola *e-government* Pemerintah Daerah yang sukses menyebabkan terjadinya kesenjangan antara Pemerintah Daerah yang satu dengan Pemerintah Daerah yang lainnya. Kesenjangan ini dapat digambarkan bagai mendudukan dua segitiga, dimana titik

segitiga bagian bawah menuju ke atas akan makin jauh. Kesenjangan tersebut tidak hanya terjadi antara daerah maju dengan daerah yang stagnan, namun juga menyebabkan integrasi database nasional menjadi makin sulit diwujudkan karena kayanya variasi sistem *e-government* antar Pemda pada skala nasional.



Gambar 2.2 Kesenjangan E-Gov antar Pemda dalam suatu daerah

2. PERMASALAHAN DASAR

Meski disadari bahwa pelayanan umum merupakan salah satu Tugas pokok dan fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, namun pada kenyataannya Sistem Informasi *e-government* yang notabene mampu mewujudkan efektifitas dan efisiensi roda pemerintahan dan pelayanan umum belum memperoleh nilai tinggi pada skala prioritas pembangunan pusat dan daerah. Secara umum terdapat beberapa faktor penyebab rendahnya perhatian Pemerintah terhadap pengembangan egovernment ini, antara lain

a) Kepemimpinan dan Politik Kepemimpinan dan Politik Teknologi Informasi dan *e-government* masih belum banyak dilihat sebagai sektor yang mampu mengangkat popularitas pada percaturan politik pusat dan

daerah. Hal ini menyebabkan komitmen pejabat pusat hingga daerah terhadap pengembangan egovernment menjadi sangat rendah. Tidak jarang egovernment justru dilihat sebagai tambang emas untuk KKN mengingat belum adanya standar biaya Teknologi Informasi bagi pemerintahan, khususnya dalam pengembangan Sistem Informasi dan database *e-government*.

b) Payung hukum / regulasi Sebagai salah satu bidang baru dalam pemerintahan, *e-government* masih miskin dalam hal perangkat hukum, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Hingga saat ini transaksi elektronik belum memiliki landasan hukum yang pasti, sehingga proses layanan publik melalui transaksi elektronik sulit untuk diterapkan pada *e-government*, padahal di sisi teknologi dan kemampuan SDM, tidak sedikit yang sudah mampu.

c) Kelembagaan Menurut level Propinsi dan daerah Cara memandang tugas pokok dan fungsi pengelola Teknologi Informasi dan *e-government* seringkali menentukan seperti apa bentuk kelembagaan pengelola Teknologi Informasi dan *E-government* Pemerintahan. Sebagai lembaga teknis, pengelola egovernment harus ditempatkan sebagai bagian dari management support unit (MSU), bukan sebagai tempat sampah. Eselonisasi dalam menentukan kelembagaannya pun sangat bervariasi, mulai ditempatkan pada posisi eselon IV hingga pada eselon II, termasuk pada eselon II dengan tugas pokok dan fungsi yang gadogado. Pada dasarnya eselonisasi ini akan menentukan seberapa besar dan luas cakupan

lembaga pengelola *e-government* mampu mengambil kebijakan strategis. Pada posisi eselon rendah, misalnya pada eselon IV dengan hanya beberapa orang staf saja, maka sulit diharapkan team inti *e-government* tersebut mampu berdaya mengelola Teknologi Informasi dan egovernment dalam pemerintahan.

d) Masterplan & Blueprint Egov Indonesia. Kondisi serba terlambat yang terjadi dalam

   pengelolaan *e-government* di Indonesia menyebabkan pengembangan *e-government* menjadi kurang terarah. Master Plan dan Blue Print nasional *e-government* secara resmi diluncurkan pada tahun 2005, sementara daerah sudah mengembangkan egovernment sejak tahun 1993.

e) Pembiayaan Anggaran bagi Teknologi Informasi dan *e-government* merupakan masalah klasik. Komitmen dan kebijakan politik sangat mempengaruhi besaran dana dan skala prioritas dalam agenda pembangunan pusat maupun daerah. Ketiadaan standar harga dalam pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi *e-government* menyebabkan *e-government* menjadi lahan yang subur untuk melakukan mark up biaya, sebagaimana terjadi pada beberapa Pemerintah Daerah di Indonesia dengan proyek *e-government* mercusuarnya. Tak heran bila proyek *e-government* harus berhadapan dengan hukum.

f) Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan sumber daya strategis dalam pengembangan *e-government*. Untuk mampu mengelola *e-government* secara profesional, diperlukan sebuah team yang

solid yang mampu meng-cover setiap aktifitas *e-government* pada berbagai satuan kerja. Team ini yang nantinya akan menjadi titik sentral, sebagai tempat bertanya dan problem solver dari civitas pemerintahan maupun publik dalam bidang Teknologi Informasi dan egovernment.

g) Birokrasi yang menghambat Birokrasi biasanya menjadi salah satu faktor penghambat dalam implementasi Teknologi Informasi dan *e-government*, banyaknya kepentingan dan status gaptek menyebabkan sumber daya strategis itu menjadi penghambat. Namun demikian pada umumnya kreatifitas para pengelola Teknologi Informasi dan *e-government* mampu menembus birokrasi yang tidak bersahabat bagi penciptaan efektifitas dan efisiensi pemerintahan dan pelayanan umum. Karena itu team yang solid serta kebesaran hati untuk menempatkan diri sebagai parner kerja satuan kerja lain merupakan salah satu kunci sukses mengatasi birokrasi yang tidak bersahabat tersebut.

h) Kesalahan persepsi & Kecurigaan Kita sering mendengarkan atau bahkan menyerukan bahwa Teknologi Informasi dan *e-government* merupakan salah satu sarana transparansi yang ampuh. Statement positif ini ternyata tidak ditanggapi positif oleh sebagian birokrat yang merasa terancam keamanannya berselancar di dunia birokrasi ilegal. Pada kenyataannya kesalahan persepsi ini cukup berbahaya bagi pengembangan Teknologi Informasi dan *e-government*, karena kepentingan masyarakat dan efektifitas efisiensi dalam birokrasi menjadi gagal secara konyol.

i) Penetrasi Teknologi Informasi Masyarakat Rendahnya penetrasi masyarakat ini lebih sering dianggap sebagai sesuatu yang tidak perlu diperhatikan. Semestinya rendahnya penerasi Teknologi Informasi di kalangan masyarakat dianggap sebagai kemiskinan dan kemelaratan sosial, terutama dihadapkan pada perkembangan dunia yang mengarah pada globalisasi. Rendahnya penetrasi Teknologi Informasi dalam masyarakat menyebabkan produk-produk *e-government* kurang dapat dimanfaatkan secara maksimal.

3. IMPLEMENTASI *E-GOVERNMENT*

Implementasi *e-government* di Indonesia belum maksimal sesuai dengan tujuannya. Sejauh ini pemanfaatan *e-government* hanya sebagai media informasi bagi masyarakat saja. Dalam perkembangannya, *E-government* merupakan bagian terpadu dalam membangun struktur, system dan proses pemerintahan yang lebih efisien, transparan dan akuntabel seperti harapan masyarakat. Beberapa lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah telah mengembangkan *E-government*, sehingga pemetaan *E-government* diIndonesia menjadi suatu hal yang diperlukan untuk mengetahui kondisi dan kesiapan dari lembaga-lembaga pemerintahan. Ada 4 level Government On Line(GOL) menurut survey Booz Allen dan Hamilton . yaitu :

a. Level 1(*Basic Presence/On Line Presence*), tampilan situs badan pemerintah hanya menyediakan informasi dan publikasi yang diperlukan masyarakat dan sifat komunikasinya hanya satu arah (download).

b. Level 2(*Prospecting/Electronic Service Delive*ry (ESD)), tampilan situs badan pemerintah menyediakan data dan informasi yang ekstensif, sehingga penyediaan fasilitas data retrieval dan information search engine merupakan keharusan. Sifat dari level GOL ini adalah komunikasi dua arah yang terbatas.

c. Level 3(*Business Integration/Seamless Government*), tampilan situs badan pemerintah juga menyediakan layanan G2B, G2C dan G2G yang memerlukan transaksi 2 arah serta mencakup transaksi pembayaran

d. Level 4(*Business Transformation/Information Society*), termasuk dalam level ini situs badan pemerintah diperlengkapi kemampuan untuk mengkonfigurasi dan kustomisasi informasi yang dipertukarkan dan berbagai saluran komunikasi yang terpadu. Berdasarkan data dari Kementrian Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) dari hasil survei terhadap lembaga-lembaga pemerintah pusat maupun daerah tingkat I dan II yang telah mendaftarkan situs go.id ke IDNIC, diperoleh 369 data alamat situs yang tercatat dalam domain go.id IDNIC. Sebanyak 303 data dapat dikenali status DNS nya masih aktif dan 281 data yang memiliki website. Oleh sebab itu disimpulkan hanya 76% website yang aktif (hidup) dari keseluruhan data go.id.

Fasilitas akses ke sistem *E-GOVERNMENT* bagi maysarakat luas dapat diberikan dalambentuk terminal-terminal secara khusus yang dipasang publik maupun memasang sis-tem informasi berbasis website agar bisa diakses melalui Internet. Agar keberadaanfasilitas dapat termanfaatkan secara optimal, diperlukan

peningkatan kualitasmasyarakat dalam bidang pengoperasian e-Gov itu sendiri. Pendidikan masyarakatdiperlukan baik untuk meningkatkan kemampuan untuk mengoperasikan system maupun untuk memberikan pengertian pada prosedur pengoperasian yang tertib agarfasilitas tidak mudah rusak keberhasilan *e-government* terletak pada ketelitian kerja operator. Keteledoran operator pemasukkan data secara langsung akan mengurangi nilai kebenaran la-poran yang dihasilkan. Selain itu, operator pemeliharaan sistem sehari-hari jugaharus bekerja dengan ketelitian dan disiplin tinggi. Keterlambatan membuat datacadangan dapat berakibat fatal apabila terjadi masalah pada data aktif. Prosedurpenyimpanan data cadangan dan bila perlu mengembalikan ke sistem utamanya perludibakukan agar layanan tidak terganggu telalu lama bila terjadi masalah.

4. KOLABORASI DALAM KORIDOR OTONOMI DAERAH

Permasalahan yang diungkap di atas dialami oleh hampir keseluruhan tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga daerah. Para pengelola Teknologi Informasi dan *e-government* pun sudah banyak melakukan action untuk mengatasi masalah dan berusaha eksis serta berkarya. Namun tentunya akan lebih mudah bila berbagai masalah yang ada diemban bersama antara pusat dan semua Pemerintah Daerah. Namun demikian perlu diingat bahwa otonomi daerah tetap ditempatkan sebagai border yang harus ditaati. Otonomi daerah yang dahulu merupakan tuntutan rakyat serta ketiadaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi pengembangan Teknologi Informasi dan egovernment harus disikapi secara positif. Di sisi lain pengembangan Sistem Informasi dan database egovernment

memerlukan biaya yang tidak sedikit. Karena itu urunan anggaran antar Pemerintah Daerah guna membangun Sistem Informasi *e-government* bersama merupakan salah satu solusi yang tidak tabu untuk ditempuh. Sebagai konsistensi dalam bidang *e-government*, maka fokus utama kolaborasi adalah sektor yang belum memiliki standard biaya dan biasanya memerlukan biaya yang tidak sedikit, yaitu Sistem Informasi dan Database *e-government*.

5. URUNAN PROJECT

Kolaborasi lintas daerah otonom dan pusat di bidang pengembangan *e-government* diberi nama URUNAN PROJECT (Proyek iuran). Project ini merupakan aksi terhadap permasalahan yang menghimpit dalam pengembangan *e-government*. Semangat yang membangun keinginan untuk mensukseskan Urunan Project, antara lain :

a) Besarnya biaya pembuatan Sistem Informasi dan database, sehingga perlu urunan dana untuk membangun SI *e-government*
b) Pengetahuan dan keterampilan yang tidak seimbang antar pengelola *e-government*, sehingga diperlukan share knowlegde antar pengelola *e-government*, karena adanya pemahaman yang relatif seimbang pada bisnis proses dalam birokrasi. Keinginan untuk mandiri, lepas ketergantungan kepada rekanan/swasta
c) Birokrasi yang berpotensi sebagai faktor penghambat, sehingga diperlukan pemberdayaan melalui share sumber daya oleh Pemerintah Daerah yang lebih mampu

d) Keinginan untuk share database dalam rangka national database interchange
e) Keinginan untuk membangun Information Technology Network guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi antar wilayah

5. KONSEP UMUM

Sebagai perwujudan dari urunan/iuran, maka dalam implementasinya project ini akan mengakomodir beberapa kegiatan, antara lain :

a) Urunan modul, standard, bisnis proses, design dan arsitektur *e-government*
b) Urunan dana, misal Rp. 500.000,- s/d Rp. 1 juta/ Sistem Informasi/Daerah
c) Urunan tenaga 4. Urunan sumberdaya Teknologi Informasi dan infrastruktur network, dan lain-lain 5. Urunan konseptual lainnya.

Sementara itu dari sudut pengembangan Sistem Informasi dan database, terdapat beberapa ketentuan umum, antara lain :

a) Sistem Informasi *e-government* yang dihasilkan menjadi limited source atau bahkan open source
b) Daerah berhak mengembangkan sesuai kebutuhan daerah dan wajib share hasil pengembangan secara bebas

Daerah yang telah membayar iuran berhak mendapatkan hasil Sistem Informasi *e-government* dalam bentuk CD lengkap dengan manualnya. Apabila daerah kesulitan mengimplementasikannya, maka dapat menjalin kerjasama dengan swasta setempat yang tentunya tetap akan menghasilkan penghematan biaya. Termasuk di dalamnya kemungkinan untuk training SDM setempat.

Pengembangan Sistem Informasi *e-government* baru lebih cenderung memposisikan sebagai jembatan integrasi database, sehingga aplikasi yang dibangun merupakan software baru bari daerah yang belum memiliki, namun menjadi bridge software bagi daerah yang sudah menjalankan Sistem Informasi egovernment yang serupa. Bridge Software ini akan melakukan konversi database yang sudah ada di daerah dengan format yang bervariasi menjadi database dengan standard nasional. Pada posisi ini dimungkinkan daerah melakukan migrasi secara bertahap menuju aplikasi baru, meski pun tidak menutup kemungkinan daerah mempertahankan Sistem Informasi yang sudah ada. Dengan demikian bridge software tetap menjadi aplikasi yang menjembatani perbedaan standard database. Hasil integrasi database ini ditampung pada egovernment interchange database server dan membangun database nasional. Dengan demikian Pemerintah Pusat akan memperoleh suply database dari daerah secara kontinue. Untuk lebih fokus pada tugas untuk membangun Sistem Informasi *e-government*, maka perlu ditetapkan markas atau pusat kegiatan Urunan Project. Pusat kegiatan Urunan Project merupakan pusat pengembangan *e-government* Indonesia (Indonesia eGovernment Development Center – IeGDC), termasuk sebagai lokasi training center.

Melalui urunan project ini, manfaat yang akan diperoleh antara lain :

a) Biaya murah, tiap Kabupaten/Kota/Propinsi/Departemen hanya terbebani Rp. 500.000 hingga Rp. 1 juta per Sistem Informasi *E-government*
b) Terwujud standarisasi Sistem Informasi yang memungkinkan integrasi database berskala nasional

c) Kreatifitas daerah untuk memodifikasi produk Sistem Informasi Urunan Project makin memperkuat keberadaan Sistem Informasi yang senantiasa ter-update
d) Pemberdayaan profesional antara sesama pengelola *e-government* dan kolaborasi antara Akademisi, Bisnis dan Government (ABG)
e) Share sumberdaya Teknologi Informasi dan egovernment lintas wilayah
f) Terwujud komunikasi antar pengelola egovernment dan ABG

Untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan bersama Sistem Informasi dan database egovernment ini, maka perlu dibentuk suatu forum komunikasi pengelola *e-government* serta pengaturan secara seimbang peran Akademisi dan Swasta dalam penyusunan standar, design, arsitektur hingga penulisan program dan training. Bukanlah hal yang berlebihan bila Pemerintah mengakomodir forum ini menjadi sebuah forum resmi berskala nasional. Melalui penguatan forum komunikasi ini, maka proses administrasi terhadap penggunaan APBD bagi Urunan Project akan lebih legitimate. Bahkan tidak menutup kemungkinan forum ini mewajibkan daerah untuk menyetor sejumlah dana per tahun bagi kepentingan Urunan Project dengan kompensasi forum *e-government* harus menghasilkan produk Sistem Informasi dan Database sesuai target yang ditetapkan. Forum ini akan serupa dengan forum Bupati/Walikota, Forum Sekretaris Daerah maupun Forum Daerah Penghasil Migas di Indonesia. Hingga saat ini, kesejajaran peran antara Akademisi, Bisnis dan Goverment (ABG) dirasakan belum seimbang. Posisi pemerintah sebagai obyek proyek masih belum bisa dirubah secara signifikan agar bisa menjadi subyek, mengingat kemampuan teknis dan

managerial masih menjadi kendala besar. Kecurigaan dan kapok terhadap perilaku rekanan (swasta/akademisi) yang tidak bertanggungjawab masih menjadi trauma tersendiri bagi daerah. Namun di sisi lain, keinginan untuk membangun egovernment dan memberikan kontribusi bagi kepentingan nasional telah terbangun pada sebagian besar Pemerintah Daerah dan Pusat. Melalui kolaborasi ini, maka terjadi subsidi silang dan saling mendukung dalam pengembangan Sistem Informasi *e-government* nasional. Untuk itu diperlukan kebesaran hati dan melepaskan ego sektoral demi terwujudnya harapan bersama ini.

2.2.2 *Web Server*

Web server menurut Minoli(1998,p33) berpendapat bahwa sebuah web *server* adalah seuatu program untuk menawarkan pelayanan yang bisa diperoleh seluruh jaringan. *Web server* merupakan suatu tipe *server* khusus yang dapat berkomunikasi langsung dengan *client* menggunakan HTTP, web *server* menerima permintaan dari client dan meresponnya, biasanya dengan mengembalikan sebuah dokumen atau gambar.

2.2.3 *Web browser*

Menurut Ellsworth, web *browser* adalah *software* yang dijalankan pada komputer pemakai yang meminta informasi dari web *server* dengan menampilkannya sesuai dengan nama *file* itu sendiri.

2.2.4 *Website*

Website merupakan *webpage* beserta *homepage*, yang merupakan system yang luas dari *server* yang menawarkan informasi untuk semua orang melalui jaringan. Informasi tersebut tersebut berupa teks, gambar, suara, dan tipe data link, yang merupakan navigasi kehalaman lainnya (*hyperlink*). *Homepage* merupakan halaman yang pertama kali muncul ketika pertama kali dibuka,sedang *webpage* adalah halaman ayang ada pada *website.*

2.2.5 HTML

HTML merupakan singkatan dari *hypertext markup language*, yang merupakan program penulisan informasi pada sebuah *hompage*. Penulisan HTML dapat dilakukan menggunakan alat bantu seperti *Notepad* yang terdapat pada *windows* atau *simple text machintosh*. Selain itu juga dapat digunakan editor HTML seperti *Macromedia Dreamweaver* dan *Microsoft Frontpage* yang dapat memudahkan dalam menulis HTML dan memungkinkan dokumen HTML yang dibuat dapat diakses oleh berbagai jenis *Browser*. HTML berupa kode-kode tag yang memberikan instruksi pada *Web Browser* untuk memberikan tampilan sesuai yang diinginkan.

2.2.6 *PHP Hypertext Preprocessor*

PHP merupakan sebuah *script open source* multifungsi yang sangat sesuai untuk pengembangan sebuah *website* dan bisa juga digabung kedalam HTML, hal yang membedakan antara PHP dengan program lain yang sejenisnya adalah bahwa eksekusi dari *code*-nya dilakukan pada sisi *server*. Ini berarti client tidak

akan bias mengetahui pemrograman seperti apa yang kita buat, berbeda dengan kode dari *Java* yang dieksekusikan pada sisi *client*-nya

Hal lain yang menjadi salah satu keunggulan lain adalah bahwa PHP sangat mudah untuk dipelajari dan dipahami oleh pemula, sedangkan *programmer* professional akan menjumpai banyak sekali fitur-fitur yang *advance*. Hampir seluruh aplikasi berbasis *web* dapat dibuat dengan PHP, namun fungsi PHP yang paling utama adalah untuk menghubungkan *database* dengan *web*. Dengan PHP, membuat aplikasi *web* yang terkoneksi ke *database* menjadi sangat mudah.

Beberapa sistem *database* yang didukung PHP adalah *Oracle, Sybase, mSQL, MySQL, Solid, Generic ODBC, dan PostgresSQL*. PHP juga mendukung komunikasi dengan layanan lain melalui protocol IMAP, SNMP, NNTP, dan POP3, dan HTTP.

2.2.7 JavaScript

Javascript merupakan *cross-platform* yang dikembangkan oleh Netscape dan pertama kali digunakan dalam *browser* Netscape. Javascript dibuat agar mudah diintegrasikan kedalam program dan aplikasi lain, misalnya *browser*. Sebagian besar *browser* saat ini sudah mendukung javascript. Oleh karena itu, *script* dari javascript biasanya dimasukkan kedalam suatu HTML dan dieksekusi di*browser* lain.

2.2.8 Pemrograman *Database*

Definisi dari *database* adalah kumpulan dari beberapa data dalam j*UML*ah banyak, saling berhubungan dan yang mempunyai arti tertentu (Riyanto, 2003), *Database* secara global terdiri dari kumpulan table yang berisi baris dan kolom.

Tiap baris dan table memiliki satu unit data yang disebut *record* dan kolom didalam table (disebut dengan *field*) merupakan keterangan dari masing-masing *record*.

Pemrograman *database* merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemudahan dalam melakukan manajemen dan akses ke sebuah *database*. Pemrograman sebuah database banyak dilakukan dengan menggunakan bahasa yang disebut dengan *Structure Query Language* (SQL). Selain SQL, Pemrograman *database* juga meliputi manipulasi objek-objek *database*, analisa *query*, dan juga interaksi *database* dengan *Open Database Connectivity (ODBC).*

Pemrograman *database* akan penulis lakukan dengan menggunakan Software database bernama MySQL. MySQL adalah sebuah *Relational Database Management System* (RDBMS) yang didistribusikan secara gratis dibawah lisensi *General Public Lisence*(GPL).

Kelebihan MySQL bila dibandingkan dengan produk-produk lain yang sejenis:

1. MySQL merupakan *software database* yang memiliki kecepatan dan reliabilitas yang tinggi dalam pemroses data.
2. MySQL mudah digunakan dan memiliki dukungan *user* yang luas.
3. Memiliki sekuritas yang baik.
4. Bisa berjalan dibanyak *platform* selain PC.
5. Mendukung banyak bahasa pemrograman seperti C, C++, *Perl*, *Phyton*, *Java,* dan PHP.

6. *Open source.*

2.2.9 Macromedia Dreamweaver

Macromedia Dreamweaver 8 merupakan suatu HTML *editor profesional* yang digunakan untuk merancang, *coding*, dan mengembangkan *website*, halaman web dan aplikasi berbasis web. Dreamweaver memudahkan *user* dalam bekerja dalam lingkungan editing yang visual yang tentunya dilengkapi dengan kontrol *hand-coding* HTML-nya.

Dreamweaver juga dapat mengembangkan *workflow* dengan menggunakan Macromedia Fireworks dan juga dapat menambahkan animasi dari Flash ke dalamnya. Selain itu, Dreamweaver menyediakan *interface* yang *full-featured coding* yang termasuk *tools code-editing* dan materi CSS, Javascript, CFML, dan bahasa lainnya.

Aplikasi yang dibangun dapat berupa aplikasi dinamis, dimana Dreamweaver kompatibel dengan teknologi server seperti CFML, ASP.NET, ASP, JSP dan PHP. Selain itu juga kompatibel dengan XML data yang telah disediakan *tools* untuk membuat halaman XSLT, menyertakan file XML dan memajangnya di halaman web.

Dreamweaver is fully customizable, yaitu dapat menciptakan objek sendiri, mengatur dan memodifikasi *shortcut* untuk *keyboard*, bahkan menulis Javascript untuk memperluas kemampuan Dreamweaver dengan *behavior, property inspector,* dan *site reports* yang baru.\

2.2.10 XAMPP

XAMPP adalah suatu bundel *web server* yang populer digunakan untuk coba-coba di *Windows* karena kemudahan instalasinya. Bundel program *open source* tersebut berisi antara lain server web Apache, interpreter PHP, dan basis data MySQL. Setelah menginstall XAMPP, kita bisa memulai pemrograman PHP di komputer sendiri maupun mencoba menginstall aplikasi-aplikasi web.

2.2.11 Konsep Perancangan Terstruktur

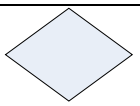
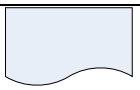
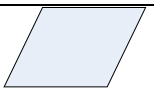
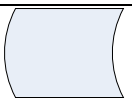
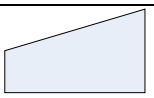
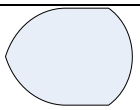
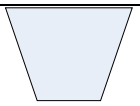
Pendekatan perancangan terstruktur dimulai dari awal 1970. Pendekatan terstruktur dilengkapi dengan alat-alat (*tools*) dan teknik-teknik (*techniques*) yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem, sehingga hasil akhir dari sistem yang dikembangkan akan diperoleh sistem yang strukturnya didefinisikan dengan baik dan jelas. Melalui pendekatan terstruktur, permasalahan yang komplek di organisasi dapat dipecahkan dan hasil dari sistem akam mudah untuk dipelihara, fleksibel, lebih memuaskan pemakainya, mempunyai dokumentasi yang baik, tepat waktu, sesuai dengan anggaran biaya pengembangan, dapat meningkatkan produktivitas dan kualitasnya akan lebih baik (bebas kesalahan).

2.2.12 *Flowmap*

Flowmap adalah campuran peta dan *flowchart*, yang menunjukkan pergerakan benda dari satu lokasi ke lokasi lain, seperti jumlah orang dalam migrasi, jumlah barang yang diperdagangkan, atau jumlah paket dalam jaringan. *Flowmap* menolong analis dan programmer untuk memecahkan masalah kedalam

segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif-alternatif lain dalam pengoperasian. Simbol-simbol *flowmap*:

Tabel 2.1. Simbol-simbol *flowmap*

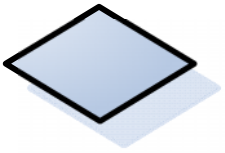
Simbol	Keterangan
	Proses : mempresentasikan operasi
	Keputusan : keputusan dalam program
	Dokumen : *input*/*output* dalam format yang dicetak
	*Input*/*output* : mempresentasikan *input* data atau *output* data yang diproses atau informasi
	*Online storage* : *input*/*output* yang menggunakan penyimpanan akses langsung
	Manual *input* : *input* yang dimasukkan secara manual dari *keyboard* atau *mouse*
	*Display* : *output* yang ditampilkan pada terminal
	Manual *operation* : operasi manusia
	*Punched card* : *input*/*output* yang menggunakan kartu.
	Anak panah : mempresentasikan alur kerja

2.2.13 *Entity Relationship* (ERD)

ERD adalah suatu pemodelan dari basisdata relasional yang didasarkan atas persepsi di dalam dunia nyata, dunia ini senantiasa terdiri dari sekumpulan objek

yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Suatu objek disebut *entity* dan hubungan yang dimilikinya disebut *relationship*. Suatu *entity* bersifat unik dan memiliki atribut sebagai pembeda dengan *entity* lainnya. Contoh : *entity* pemilih, mempunyai atribut nip (nomor induk pemilih) yang bersifat unik, nama, alamat dan atribut yang lainnya. ERD terdiri dari:

Tabel 2.2. Simbol-simbol ERD

Simbol	Keterangan
	Menggambarkan himpunan entitas. Entitas merupakan objek utama yang informasi akan disimpan, biasanya berupa kata benda, seperti; Mahasiswa, Dosen, Nasabah, Mata Kuliah, Ruangan, dan lain-lain. Objek dapat berupa benda nyata maupun abstrak.
	Menggambarkan atribut-atribut entitas. Atribut merupakan deskripsi dari objek yang bersangkutan
	Menggambarkan hubungan antara himpunan entitas.
	Relationship merupakan suatu hubungan yang terjalin antara dua entitas yang ada.

ERD sebagai suatu pemodelan setidaknya memiliki beberapa karakteristik dan manfaat sebagai berikut:

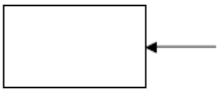
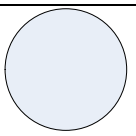
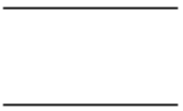
- Memudahkan untuk dilakukannya analisis dan perubahan sistem sejak dini, bersifat murah dan cepat
- Memberikan gambaran umum akan sistem yang akan di buat sehingga memudahkan *developer*.
- Menghasilkan dokumentasi yang baik untuk client sebagai bahan diskusi dengan bentuk E-R.
- Memudahkan untuk dilakukannya analisis dan perubahan sistem sejak dini, bersifat Diagram itu sendiri.
- Kamus data bagi bagi para pengembang *database*.

2.2.14 Data Flow Diagram (DFD)

Data Flow Diagram (DFD) adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. DFD ini adalah salah satu alat pembuatan model yang sering digunakan, khususnya bila fungsi-fungsi sistem merupakan bagian yang lebih penting dan kompleks dari pada data yang dimanipulasi oleh sistem. Dengan kata lain, DFD adalah alat pembuatan model yang memberikan penekanan hanya pada fungsi sistem.

DFD ini merupakan alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi dapat digunakan untuk penggambaran analisa maupun rancangan sistem yang mudah dikomunikasikan oleh profesional sistem kepada pemakai maupun pembuat program. Komponen DFD menurut Yourdan dan De Marco:

Tabel 2.3. Komponen DFD menurut Yourdan dan De Marco

Nama	Keterangan
	Terminator Sumber (*source*) : terminator yang menjadi sumber.
	Terminator Tujuan (*sink*) : terminator yang menjadi tujuan data/informasi sistem.
	Proses : menggambarkan bagian dari sistem yang mentransformasikan *input* menjadi *output*.
	Data *store* : biasanya berkaitan dengan penyimpanan-penyimpanan, seperti *file* atau *database* yang berkaitan dengan penyimpanan secara komputerisasi, misalnya *file* disket, *file* harddisk, *file* pita magnetik. Data *store* juga berkaitan dengan penyimpanan secara manual seperti buku alamat, *file folder*, dan agenda.
	Alur data ini digunakan untuk menerangkan perpindahan data atau paket data/informasi dari satu bagian sistem ke bagian lainnya.

2.2.15 Pengenalan PHP (*Personal Home Page*)

PHP (*Personal Home Page*) merupakan *script* untuk pemrograman *web server-side*, *script* yang membuat dokumen HTML secara *on the fly*, dokumen HTML yang dihasilkan dari suatu aplikasi bukan dokumen HTML yang dibuat dengan menggunakan teks *editor* atau *editor* HTML. Dengan menggunakan PHP, maintanance suatu *situs web* menjadi lebih mudah. Proses *update* data dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang dibuat dengan menggunakan *script*

PHP. PHP/FI merupakan nama awal dari PHP, dibuat pertama kali oleh Rasmus Lerdoff. PHP awalnya merupakan program CGI yang dikhususkan untuk menerima *input* melalui *form* yang ditampilkan dalam *browser web*. *Software* ini disebarkan dan dilisensikan sebagai perangkat lunak *Open Source*.

Adapun keunggulan yang dimiliki oleh PHP adalah:

1) *Life Cycle* yang sangat singkat, sehingga PHP selalu *up to date* mengikuti perkembangan teknologi internet.
2) *Cross Platform*, yakni PHP dapat dipakai di hampir semua *webserver* yang ada di pasaran (terutama Apache dan Microsoft IIS) dan dijalankan pada berbagai sistem operasi (Linux, Windows, FreeBSD).
3) PHP mendukung koneksi ke banyak *database* baik yang gratis maupun komersil, seperti *MySQL, mSQL, Oracle, Microsoft SQL Server, Interbase*, dan banyak lagi.
4) PHP bersifat *open source* dan gratis. Kemudahan dalam mendapatkan dokumentasi. di Internet, kita tidak akan sulit untuk mencari baik itu referensi, kode-kode PHP yang sudah jadi dan juga mengajukan pertanyaan pada grup-grup diskusi yang di dalamnya banyak sekali para master PHP.

2.2.16 *MySQL*

MySQL merupakan sebuah *software* yang berguna sebagai suatu *database server* yang cukup terkenal. Kepopulerannya seiring dengan *user*an *script* PHP untuk *web programming*. *Database server* itu sendiri merupakan suatu *software* yang bertugas untuk melayani permintaan (*request*) *query* dari *client*.

MySQL sebagai suatu *database server* mempunyai beberapa kemampuan, salah satunya harus menyediakan suatu sistem manajemen *database* yang dapat mengatur bagaimana menyimpan, menambah, mengakses data dan transaksi-transaksi *database* lainnya. *MySQL* cepat sekali berkembang, karena *MySQL* merupakan suatu *software* yang *Open Source*.

MySQL adalah *Relational Database Management System* (RDBMS) yang didistribusikan secara gratis dibawah lisensi GPL (*General Public License*). Dimana setiap orang bebas untuk menggunakan *MySQL*, namun tidak boleh dijadikan produk turunan yang bersifat komersial. *MySQL* sebenarnya merupakan turunan salah satu konsep utama dalam *database* sejak lama, yaitu SQL (*Structured Query Language*). SQL adalah sebuah konsep pengoperasian *database*, terutama untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan data, yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan mudah secara otomatis.

Keandalan suatu sistem *database* (DBMS) dapat diketahui dari cara kerja optimizer-nya dalam melakukan proses perintah-perintah SQL, yang dibuat oleh *user* maupun program-program aplikasinya. Sebagai *database server*, *MySQL* dapat dikatakan lebih unggul dibandingkan *database server* lainnya dalam *query* data. Hal ini terbukti untuk *query* yang dilakukan oleh *single user*, kecepatan *query MySQL* bisa sepuluh kali lebih cepat dari PostgreSQL dan lima kali lebih cepat dibandingkan Interbase.

MySQL memiliki beberapa keistimewaan, antara lain :

1. *Portabilitas*. *MySQL* dapat berjalan stabil pada berbagai sistem operasi seperti *Windows, Linux, FreeBSD, Mac Os X Server, Solaris, Amiga*, dan masih banyak lagi.
2. *Open Source*. *MySQL* didistribusikan secara *open source*, dibawah lisensi GPL sehingga dapat digunakan secara cuma-cuma.
3. *Multiuse*. *MySQL* dapat digunakan oleh beberapa *user* dalam waktu yang bersamaan tanpa mengalami masalah atau konflik.
4. *Performance tuning*. *MySQL* memiliki kecepatan yang menakjubkan dalam menangani *query* sederhana, dengan kata lain dapat memproses lebih banyak SQL per satuan waktu.
5. Jenis Kolom. *MySQL* memiliki tipe kolom yang sangat kompleks, seperti *signed/unsigned integer*, *float*, *double*, *char*, *text*, *date*, *timestamp*, dan lain-lain.
6. Perintah dan Fungsi. *MySQL* memiliki operator dan fungsi secara penuh yang mendukung perintah *Select* dan *Where* dalam perintah (*query*).
7. Keamanan. *MySQL* memiliki beberapa lapisan sekuritas seperti *level subnetmask*, nama *host*, dan izin akses *user* dengan sistem perizinan yang mendetail serta sandi terenkripsi.
8. Skalabilitas dan Pembatasan. *MySQL* mampu menangani basis data dalam skala besar, dengan j*UML*ah rekaman (*records)* lebih dari 50 juta dan 60 ribu tabel serta 5 milyar baris. Selain itu batas indeks yang dapat ditampung mencapai 32 indeks pada tiap tabelnya.

9. Konektivitas. *MySQL* dapat melakukan koneksi dengan klien menggunakan protokol TCP/IP, *Unix soket* (UNIX), atau *Named Pipes* (NT).
10. Lokalisasi. *MySQL* dapat mendeteksi pesan kesalahan pada *client* dengan menggunakan lebih dari dua puluh bahasa. Meskipun demikian, bahasa Indonesia belum termasuk di dalamnya.
11. Antar Muka. *MySQL* memiliki *interface* (antar muka) terhadap berbagai aplikasi dan bahasa pemrograman dengan menggunakan fungsi API (*Application Programming Interface*).
12. Klien dan Peralatan. *MySQL* dilengkapi dengan berbagai peralatan (*tool*) yang dapat digunakan untuk administrasi basisdata, dan pada setiap peralatan yang ada disertakan petunjuk *online*.
13. Struktur tabel. *MySQL* memiliki struktur tabel yang lebih fleksibel dalam menangani *ALTER TABLE*, dibandingkan basisdata lainnya semacam PostgreSQL ataupun Oracle.

2.2.17 *Client-Server*

Client-Server adalah arsitektur jaringan yang memisahkan *client* (biasanya aplikasi yang menggunakan GUI) dengan *server*. Masing-masing *clien*t dapat meminta data atau informasi dari *server*. Perbedaan karakteristik sistem *client* dan *server*:

1) *Service* (layanan)
   a) Hubungan antara proses yang berjalan pada mesin yang berbeda.
   b) Pemisahan fungsi berdasarkan ide layanannya.

c) *Server* sebagai *provider* dan *client* sebagai konsumen.

2) *Sharing Resources* (sumber daya)

Server bisa melayani beberapa *client* pada waktu yang sama dan meregulasi akses bersama untuk *share* sumber daya dalam menjamin konsistensinya

3) *Asymmetrical Protocol* (protokol yang tidak simetris)

Many-to-one relationship antara *client* dan *server*. *Client* selalu menginisiasikan dialog melalui layanan permintaan dan *server* menunggu secara pasif *request* dari *client*.

4) Pengaksesan yang mudah

Proses yang dilakukan *server* boleh terletak pada mesin yang sama atau pada mesin yang berbeda melalui jaringan. Lokasi *server* harus mudah diakses dari *client*.

5) Pesan berbasiskan komunikasi

Interaksi *server* dan *client* melalui pengiriman pesan yang menyertakan permintaan dan jawaban.

6) Pemisahan *interface* dan implementasi

Server bisa di-*upgrade* tanpa mempengaruhi *client* selama *interface* pesan yang diterbitkan tidak berubah.